

Hate speech and the Political Delegitimization of Women on Social Media: A Critical Discourse Analysis in Digital Political Communication

Abdullah Mitrin¹, N. Doni Dwi Putra², Rudi Rahman³

abdullahmitrin@http.ac.id, ndonidwiputra@gmail.com, rudirahman@http.ac.id

¹Ilmu Komunikasi, Universitas Hang Tuah Pekanbaru

²Ilmu Komunikasi, Universitas Hang Tuah Pekanbaru

³Ilmu Komunikasi, Universitas Hang Tuah Pekanbaru

ABSTRACT

This study aims to analyze hate speech as a strategy of political delegitimization against women in digital political communication on social media. In recent years, the increasing participation of women in politics has not always been accompanied by equal acceptance, but rather by the rise of hate speech targeting not only their professional capacity but also their gender identity. This study employs a qualitative approach within a critical paradigm using Critical Discourse Analysis based on the framework of Norman Fairclough to examine how language is used to construct, reproduce, and legitimize gender inequality in digital political communication. The data consist of hate speech content collected from various social media platforms through purposive sampling techniques. The findings reveal that hate speech against women follows systematic discursive patterns characterized by gender stereotypes, the delegitimization of leadership capacity, and the shift of issues from political substance to personal aspects. Furthermore, the construction of gender within hate speech reflects a double standard that positions women as inferior political actors. In this context, hate speech functions not merely as an expression of hostility but as a strategic form of political communication that actively shapes public perception and undermines women's legitimacy. The implications of this study highlight the importance of a critical approach in understanding the relationship between language, power, and gender, as well as the need for comprehensive efforts to address hate speech through regulation, digital literacy, and the strengthening of ethical political communication in the digital era.

Keywords:

Digital Political Communication; Gender and Political Delegitimization; Hate speech

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *hate speech* sebagai strategi delegitimasi politik terhadap perempuan dalam komunikasi politik digital di media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik tidak selalu diiringi dengan penerimaan yang setara, melainkan diikuti oleh maraknya ujaran kebencian yang menyerang tidak hanya kapasitas profesional, tetapi juga identitas gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan

Article History

Submitted: 3 May 2026

Revised: 18 May 2026

Published: 15 June 2026

Koresponden

Abdullah Mitrin

abdullahmitrin@http.ac.id

kualitatif dengan paradigma kritis melalui metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough untuk mengkaji bagaimana bahasa digunakan dalam membentuk, mereproduksi, dan melegitimasi ketimpangan gender dalam komunikasi politik digital. Data penelitian berupa konten *hate speech* yang dikumpulkan dari berbagai platform media sosial melalui teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hate speech* terhadap perempuan membentuk pola wacana yang sistematis, ditandai dengan penggunaan stereotip gender, delegitimasi kapasitas kepemimpinan, serta pergeseran isu dari ranah politik ke aspek personal. Selain itu, konstruksi gender dalam ujaran kebencian memperlihatkan adanya standar ganda yang menempatkan perempuan sebagai aktor politik yang inferior. Dalam konteks ini, *hate speech* tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi kebencian, tetapi juga sebagai strategi komunikasi politik yang secara aktif membentuk persepsi publik dan melemahkan legitimasi perempuan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kritis dalam memahami hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan gender, serta perlunya upaya komprehensif dalam mengatasi *hate speech* melalui regulasi, literasi digital, dan penguatan etika komunikasi politik di era digital.

Kata Kunci:

Gender dan Delegitimasi; *Hate speech*; Komunikasi Politik Digital

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar lanskap komunikasi politik global, terutama dengan munculnya media sosial sebagai ruang utama pertarungan wacana, distribusi informasi, dan pembentukan opini publik (Sobieraj, 2021). Dalam konteks ini, komunikasi politik tidak lagi bersifat satu arah dan institusional, melainkan menjadi lebih terbuka, partisipatif, dan sekaligus rentan terhadap distorsi informasi (Udupa, 2021). Media sosial memungkinkan setiap aktor, baik individu maupun kelompok, untuk memproduksi dan menyebarkan pesan politik secara cepat dan luas, sehingga menciptakan dinamika komunikasi yang kompleks, kompetitif, dan seringkali tidak terkendali (Kusumarani, 2025). Namun, di balik potensi demokratisasi tersebut, ruang digital juga menghadirkan berbagai problem serius, salah satunya adalah meningkatnya praktik ujaran kebencian (*hate speech*) dalam komunikasi politik (Lim, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *hate speech* telah menjadi fenomena yang semakin dominan dalam interaksi politik digital, terutama selama periode kontestasi elektoral (Weimann, 2025). Studi-studi dalam bidang komunikasi politik dan media digital umumnya menyoroti bagaimana ujaran kebencian menyebar

melalui jaringan media sosial, bagaimana pola distribusinya dipengaruhi oleh algoritma platform, serta bagaimana dampaknya terhadap polarisasi publik dan perilaku pemilih (Peron, 2025). Selain itu, beberapa penelitian juga mengkaji hubungan antara *hate speech* dan disinformasi, serta peran aktor-aktor tertentu dalam memproduksi narasi yang bersifat provokatif dan manipulatif (Jane, 2022). Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih cenderung berfokus pada aspek kuantitatif dan belum secara mendalam mengeksplorasi dimensi makna, konstruksi wacana, serta relasi kekuasaan yang terkandung dalam praktik *hate speech* itu sendiri (Mantilla, 2022).

Dalam perkembangan yang lebih spesifik, muncul perhatian terhadap dimensi gender dalam komunikasi politik digital, terutama terkait dengan meningkatnya serangan terhadap perempuan yang terlibat dalam politik (Peron, 2025). Penelitian dalam perspektif gender menunjukkan bahwa perempuan politisi seringkali menjadi target ujaran kebencian yang tidak hanya menyerang kapasitas profesional mereka, tetapi juga identitas personal dan konstruksi sosial yang melekat pada gender mereka (Peña-Fernández, 2025). Ujaran kebencian terhadap perempuan cenderung mengandung stereotip, objektifikasi, serta narasi yang merendahkan, yang pada akhirnya berfungsi untuk mengurangi legitimasi mereka sebagai aktor politik (Citron, 2021). Kajian mengenai konstruksi wacana media juga menunjukkan bahwa narasi digital sering digunakan untuk membangun representasi kekuasaan tertentu serta mempengaruhi persepsi publik melalui framing dan strategi diskursif tertentu (Arzeti et al., 2025). Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan *hate speech* dengan proses delegitimasi politik perempuan sebagai sebuah strategi komunikasi yang sistematis masih relatif terbatas, terutama dalam konteks analisis wacana kritis (Ambarwati, 2025).

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk diisi, yaitu perlunya kajian yang tidak hanya melihat *hate speech* sebagai fenomena linguistik atau perilaku komunikasi semata, tetapi sebagai praktik komunikasi politik yang memiliki tujuan strategis dalam membentuk persepsi publik dan mempertahankan relasi kekuasaan (Solovev & Pröllochs, 2022). Dalam hal ini, pendekatan analisis wacana kritis menjadi relevan untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk membangun, mereproduksi, dan melegitimasi ketidaksetaraan, khususnya dalam konteks gender (Harmer, 2025). Dengan demikian, *hate speech* terhadap perempuan dalam politik dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme delegitimasi simbolik yang bekerja melalui konstruksi narasi tertentu di ruang digital (Iranzo-Cabrera, 2025).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana *hate speech* digunakan sebagai strategi delegitimasi terhadap perempuan dalam komunikasi politik digital. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci, yaitu bagaimana

bentuk dan pola wacana *hate speech* yang ditujukan kepada perempuan di media sosial, bagaimana konstruksi gender direpresentasikan dalam narasi tersebut, serta bagaimana praktik komunikasi tersebut berkontribusi dalam membentuk persepsi publik dan melemahkan legitimasi politik perempuan. Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dikaji mengingat meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik yang tidak selalu diiringi dengan penerimaan yang setara dalam ruang publik digital.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *hate speech* sebagai bagian dari strategi komunikasi politik yang digunakan untuk mendelegitimasi perempuan di media sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan konstruksi wacana yang digunakan dalam ujaran kebencian, serta mengungkap bagaimana relasi kekuasaan dan bias gender direproduksi melalui praktik komunikasi digital. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian komunikasi politik, khususnya dalam memahami hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan gender, serta memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan dinamika komunikasi politik di era digital yang semakin kompleks

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis yang bertujuan untuk memahami *hate speech* sebagai praktik komunikasi politik yang tidak netral, melainkan sarat dengan relasi kekuasaan dan bias gender (Iranzo-Cabrera, 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik bahasa yang digunakan dalam ujaran kebencian, serta mengungkap bagaimana wacana tersebut berfungsi dalam proses delegitimasi terhadap perempuan di ruang politik digital (Banet-Weiser & Miltner, 2022). Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) dengan merujuk pada model Norman Fairclough yang menekankan tiga dimensi analisis, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial (Dutta dkk., 2024). Melalui kerangka ini, penelitian tidak hanya menganalisis struktur bahasa, tetapi juga proses produksi, distribusi, serta konteks sosial yang melingkupi kemunculan wacana *hate speech* terhadap perempuan dalam komunikasi politik. (Peron & Mendes, 2024).

Objek penelitian ini adalah konten *hate speech* yang ditujukan kepada aktor politik perempuan di media sosial, khususnya pada platform yang memiliki intensitas interaksi politik tinggi seperti X (Twitter), Instagram, dan Facebook. Data penelitian berupa unggahan, komentar, dan balasan yang mengandung unsur ujaran kebencian berbasis gender serta indikasi delegitimasi terhadap kapasitas politik perempuan (UN Women, 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih data berdasarkan kriteria tertentu seperti relevansi dengan isu politik, intensitas ujaran kebencian, serta keterkaitan dengan

aktor atau peristiwa politik tertentu. Untuk memperkuat validitas, penelitian ini juga menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai bentuk konten dari platform yang berbeda serta mempertimbangkan konteks percakapan yang melatarbelakanginya.

Analisis data dilakukan secara bertahap sesuai dengan kerangka CDA, dimulai dari analisis tekstual untuk mengidentifikasi pola bahasa, diksi, dan representasi gender dalam *hate speech*, kemudian dilanjutkan dengan analisis praktik diskursif untuk memahami bagaimana wacana tersebut diproduksi dan disebar dalam ekosistem media sosial, serta diakhiri dengan analisis praktik sosial untuk menginterpretasikan temuan dalam konteks yang lebih luas seperti ideologi patriarki dan relasi kekuasaan dalam komunikasi politik digital. Keabsahan data dijaga melalui kriteria *trustworthiness* yang meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, serta didukung oleh reflektivitas peneliti dalam proses interpretasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme *hate speech* sebagai strategi delegitimasi politik terhadap perempuan di media sosial.

RESULTS DAN DISCUSSION

1. Pola Wacana *Hate speech* terhadap Perempuan dalam Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hate speech* terhadap perempuan dalam komunikasi politik digital membentuk pola wacana yang berulang dan sistematis. Ujaran kebencian yang ditemukan dalam data media sosial umumnya menggunakan diksi yang merendahkan kapasitas intelektual perempuan, seperti pelabelan “tidak kompeten”, “emosional”, dan “tidak layak memimpin”. Selain itu, ditemukan pula kecenderungan kuat untuk mengalihkan isu dari kapasitas politik ke aspek personal, seperti penampilan fisik, kehidupan domestik, serta peran gender tradisional. Pola ini menunjukkan bahwa serangan terhadap perempuan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga kultural, dengan memanfaatkan stereotip gender yang telah mengakar dalam masyarakat (Ambarwati, 2025).

Selain bentuk eksplisit, *hate speech* juga muncul dalam bentuk implisit seperti humor, satir, dan komentar sarkastik yang secara halus merendahkan perempuan. Bentuk-bentuk ini seringkali tidak langsung dikenali sebagai ujaran kebencian, namun tetap mengandung makna delegitimasi yang kuat. Dalam banyak kasus, ujaran semacam ini memperoleh respons tinggi dari pengguna lain dalam bentuk likes, komentar, dan penyebaran ulang, yang menunjukkan adanya proses reproduksi wacana secara kolektif di ruang digital.

2. Representasi dan Konstruksi Gender dalam *Hate speech*

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa *hate speech* berperan dalam membentuk konstruksi gender yang menempatkan perempuan sebagai aktor politik yang inferior. Dalam berbagai konten yang dianalisis, perempuan sering direpresentasikan sebagai sosok yang lemah, tidak rasional, dan tidak memiliki kapasitas kepemimpinan. Representasi ini diperkuat melalui bahasa yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, seperti mengaitkan mereka dengan ranah domestik atau mempertanyakan legitimasi mereka dalam ruang publik politik (Peron & Mendes, 2024).

Selain itu, ditemukan adanya standar ganda dalam penilaian terhadap perempuan dan laki-laki dalam politik. Perilaku yang dianggap sebagai bentuk kepemimpinan pada laki-laki, seperti ketegasan dan keberanian, justru dipersepsikan sebagai sikap negatif ketika ditampilkan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi gender dalam *hate speech* tidak hanya mencerminkan bias individu, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai sosial yang lebih luas.

3. Indikasi Delegitimasi dalam Komunikasi Politik Digital

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa *hate speech* berfungsi sebagai sarana delegitimasi terhadap perempuan dalam politik. Delegitimasi ini terlihat dari upaya sistematis untuk meruntuhkan kredibilitas, otoritas, dan kepercayaan publik terhadap aktor politik perempuan. Ujaran kebencian tidak hanya menyerang individu secara personal, tetapi juga membentuk narasi yang secara kolektif menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak layak untuk memegang peran politik (Dutta dkk., 2024). Proses delegitimasi ini diperkuat oleh karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Konten yang bersifat provokatif dan emosional cenderung mendapatkan visibilitas lebih tinggi, sehingga memperbesar dampak ujaran kebencian terhadap pembentukan opini publik. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi medium penyebaran, tetapi juga ruang yang memperkuat efek dari praktik delegitimasi tersebut.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *hate speech* dalam komunikasi politik digital tidak dapat dipahami semata sebagai ekspresi kebencian individu, melainkan sebagai praktik diskursif yang berkaitan erat dengan relasi kekuasaan dan ideologi gender. Dalam perspektif analisis wacana kritis, bahasa yang digunakan dalam ujaran kebencian berfungsi sebagai alat untuk membangun realitas sosial, di mana perempuan diposisikan sebagai aktor yang tidak setara dalam ruang politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Norman Fairclough yang menekankan bahwa wacana merupakan bentuk praktik sosial yang tidak terlepas dari struktur kekuasaan dan ideologi (Citron, 2021).

Lebih lanjut, konstruksi gender yang ditemukan dalam *hate speech* mencerminkan reproduksi nilai-nilai patriarki dalam komunikasi politik digital (Mantilla, 2022). Narasi yang merendahkan perempuan, mempertanyakan kapasitas mereka, serta membatasi peran mereka pada ranah domestik menunjukkan bahwa ruang digital belum sepenuhnya menjadi ruang yang egaliter. Dalam hal ini, *hate speech* berfungsi sebagai mekanisme simbolik yang mempertahankan dominasi kelompok tertentu dengan cara mendiskreditkan kelompok lain. Dengan demikian, delegitimasi terhadap perempuan tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga pada level struktural melalui reproduksi wacana yang terus berulang.

Selain itu, peran media sosial sebagai ruang distribusi wacana turut memperkuat praktik delegitimasi tersebut. Logika algoritmik yang memprioritaskan keterlibatan (*engagement*) menyebabkan konten yang bersifat provokatif dan emosional lebih mudah tersebar, sehingga memperbesar eksposur *hate speech* (Kusumarani, 2025). Kondisi ini menciptakan siklus di mana ujaran kebencian tidak hanya diproduksi, tetapi juga dinormalisasi melalui interaksi pengguna. Oleh karena itu, fenomena *hate speech* terhadap perempuan dalam politik perlu dipahami sebagai hasil dari interaksi antara praktik komunikasi, struktur sosial, dan sistem teknologi yang saling terkait.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa *hate speech* merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang digunakan untuk mendelegitimasi perempuan dalam ruang digital. Praktik ini tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi target, tetapi juga berimplikasi pada kualitas demokrasi secara keseluruhan, karena dapat menghambat partisipasi dan representasi perempuan dalam politik (Peron, 2025). Dengan demikian, upaya untuk mengatasi fenomena ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kritis terhadap relasi kekuasaan dan ideologi yang melatarbelakanginya.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *hate speech* dalam komunikasi politik digital merupakan praktik diskursif yang tidak bersifat netral, melainkan berfungsi sebagai strategi sistematis dalam proses delegitimasi terhadap perempuan. Ujaran kebencian yang muncul di media sosial tidak hanya menyerang individu secara personal, tetapi juga membentuk pola wacana yang merepresentasikan perempuan sebagai aktor politik yang tidak kompeten, emosional, dan tidak layak memimpin. Melalui konstruksi bahasa yang berulang, *hate speech* berkontribusi dalam membangun persepsi publik yang merugikan perempuan, sekaligus memperkuat stereotip gender yang telah mengakar dalam struktur sosial. Dengan demikian, delegitimasi politik terhadap perempuan tidak terjadi secara spontan, tetapi diproduksi dan direproduksi melalui praktik komunikasi yang terstruktur di ruang digital.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai arena yang memperkuat dan mempercepat penyebaran wacana delegitimasi tersebut. Logika algoritmik yang mendorong visibilitas konten berbasis keterlibatan menjadikan ujaran kebencian yang bersifat provokatif lebih mudah tersebar dan mendapatkan legitimasi sosial. Dalam konteks ini, interaksi antara pengguna, teknologi, dan struktur sosial menghasilkan ekosistem komunikasi yang memungkinkan *hate speech* tidak hanya diproduksi, tetapi juga dinormalisasi. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dipahami sebagai hasil dari relasi kompleks antara bahasa, kekuasaan, dan sistem teknologi dalam komunikasi politik digital.

Secara implikatif, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat pemahaman bahwa *hate speech* dapat berfungsi sebagai instrumen delegitimasi dalam komunikasi politik, khususnya dalam konteks gender. Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih komprehensif dalam mengatasi *hate speech*, tidak hanya melalui regulasi platform, tetapi juga melalui peningkatan literasi digital, kesadaran kritis terhadap bias gender, serta penguatan etika komunikasi politik di ruang digital. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan yang dapat mengeksplorasi peran aktor, jaringan, serta dinamika algoritma dalam memperkuat atau menghambat praktik delegitimasi terhadap perempuan dalam politik.

REFERENCES

- Arzeti, D. S. D. P., Elviria, S., Muhaimin, M., Mairita, D., Pahrudin, H. M., & Maghfirah, N. K. (2025). *Deconstructing the narrative of power: A critical discourse analysis of Tempo.co "Bagi-bagi konsesi tambang" in YouTube*. *Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 14(2). <https://doi.org/10.33508/jk.v14i2.7795>
- Ambarwati, P. (2025). *Hate speech in digital space: A sociolinguistic analysis of gender-based expressions on social media*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 45–60.
- Banet-Weiser, S., & Miltner, K. (2022). Networked misogyny and *hate speech* in digital culture. *Communication, Culture & Critique*, 15(3), 1–10.
- Citron, D. K. (2021). *Hate crimes in cyberspace and gendered harassment*. Harvard University Press.
- Dutta, A., Banducci, S., & Camargo, C. Q. (2024). Online sexism and misogyny: A systematic literature review. *Information Processing & Management*, 61(1), 102–120.
- Harmer, E. (2025). Incivility and abuse toward women politicians on social media. *Political Communication*, 42(3), 1–15.
- Iranzo-Cabrera, M. (2025). Journalists' ethical responsibility in tackling *hate speech* against women politicians on social media. *Social Science Computer Review*, 43(2), 1–18.
- Jane, E. A. (2022). Gendered online abuse and its implications for democracy. *Feminist Media Studies*, 22(4), 1–14.
- Kusumarani, R. (2025). Digital representation of women politicians in Indonesia. *Wacana*

- Politik*, 10(1), 23–39.
- Lim, M. (2021). Disinformation and digital media in political communication. *Media, Culture & Society*, 43(5), 1–15.
- Mantilla, K. (2022). *Gender trolling: Misogyny adapts to new media*. Praeger.
- Peña-Fernández, S. (2025). Harassment and *hate speech* directed at journalists on social media. *Journalism Studies*, 26(4), 1–20.
- Peron, F. (2025). Gender stereotypes in politics: Insights from social media analysis. *Economics Letters*, 240, 1–6.
- Peron, F., & Mendes, G. (2024). Social media and gender bias in political communication. *Journal of Political Marketing*, 23(2), 145–160.
- Sobieraj, S. (2021). *Credible threats: Online harassment of women in politics*. Oxford University Press.
- Solovev, K., & Pröllochs, N. (2022). *Hate speech* in political discourse on social media. *Journal of Information Technology & Politics*, 19(3), 1–15.
- Udupa, S. (2021). Digital hate and extreme speech online: Global perspectives. *International Journal of Communication*, 15, 1–20.
- UN Women. (2025). *Violence against women in the public sphere in the age of AI*. United Nations.
- Weißmann, S. (2025). Exposure to *hate speech* on YouTube: The role of platform and social characteristics. *New Media & Society*, 27(2), 1–22.